

OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIAP SULTENG) DALAM PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

Moh. Rezal Rahmandi Rampadio

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Sulteng dalam mendukung pengelolaan data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIAP Sulteng didukung oleh adanya kebijakan digitalisasi manajemen ASN, komitmen pimpinan, ketersediaan infrastruktur, serta fitur aplikasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data kepegawaian. Namun demikian, implementasi aplikasi masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya literasi digital sebagian ASN, kurang optimalnya sosialisasi dan pelatihan, kendala teknis sistem dan jaringan, belum konsistennya pemutakhiran data, serta masih berlangsungnya proses administrasi manual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan SIAP Sulteng memerlukan peningkatan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan secara terpadu, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar aplikasi dapat memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pelayanan dan pengambilan keputusan kepegawaian.

Kata kunci: sistem informasi kepegawaian, manajemen ASN, kualitas sistem, pelayanan publik, digitalisasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the utilization of the Sulteng Apparatus Information System (SIAp) application in supporting personnel data management at the Regional Civil Service Agency of Central Sulawesi Province. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation, while data analysis used the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the utilization of SIAp Sulteng is supported by the presence of civil servant management digitalization policies, leadership commitment, availability of infrastructure, and integrated application features, thus enhancing the efficiency and accuracy of personnel data management. However, the implementation of the application still faces several obstacles, including low digital literacy among some civil servants, suboptimal dissemination and training, technical system and network constraints, and incomplete the consistency of data updates, as well as the ongoing manual administrative processes. This study concludes that optimizing the use of SIAp Sulteng requires an integrated improvement in system quality, information quality, and service quality, as well as strengthening human resource capacity so that the application can have a tangible impact on the effectiveness of services and personnel decision-making.

Keywords: *personnel information system, civil servant management, system quality, public service, digitalization.*

A. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi saat ini, tuntutan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi semakin mendesak. Transformasi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, individu dan organisasi dituntut untuk memanfaatkan alat dan platform digital guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang baru dalam hal akses informasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam konteks ini, kemampuan untuk beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi digital menjadi kunci untuk bertahan

dan bersaing di pasar global yang semakin kompetitif

Tuntutan untuk mengadopsi sistem informasi berbasis data semakin mendesak. Transformasi digital telah mengubah cara organisasi beroperasi, berkomunikasi, dan memberikan layanan. Data menjadi aset yang sangat berharga, dan kemampuan untuk mengelola serta menganalisis data secara efektif menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan sistem informasi berbasis data, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat, merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, serta mengoptimalkan proses bisnis. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi yang canggih dan integrasi data yang baik menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia yang semakin terhubung ini.¹

Perkembangan sistem informasi berbasis data telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari awalnya yang hanya digunakan untuk pengolahan data sederhana, kini sistem informasi telah menjadi alat yang esensial dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, sistem informasi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui analisis data yang mendalam. Dengan penerapan big data dan teknologi analitik, pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, menciptakan layanan publik yang lebih responsif dan berbasis bukti.

¹ Ali, M. A. (2014). *Analisis optimalisasi pelayanan konsumen berdasarkan teori antrian pada KALTIMGPS.com di Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2(3), 346–357.

Sistem informasi berbasis data di pemerintahan juga memungkinkan integrasi berbagai layanan publik, sehingga memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Melalui portal layanan publik yang terintegrasi, warga dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai layanan yang tersedia, mengajukan permohonan, dan melacak status permohonan mereka secara real-time. Selain itu, penggunaan sistem informasi ini juga mendukung transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif.²

Pemerintah semakin berfokus pada pengembangan sistem informasi yang berbasis cloud, yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara efisien. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, data dari berbagai departemen dapat diakses dan dianalisis secara bersamaan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi sistem informasi berbasis data di pemerintahan sangat bergantung pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pegawai Pemerintah perlu dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi

² Anjelita, P. & Rosiska, E. (2019). *Rancang Bangun Sistem Informasi E-Learning pada SMK Negeri 3 Batam*. Computer and Science Industrial Engineering (COMASIE), 1(01), 132–141.

juga menjadi bagian integral dari strategi pemerintahan yang modern dan responsif terhadap perubahan zaman.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Di era digital, sistem informasi terintegrasi menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi kepegawaian. Pemerintah Indonesia mendorong penerapan sistem berbasis digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan Good Governance, yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang efektif.³ Namun, meskipun berbagai aplikasi telah dikembangkan, implementasinya di tingkat daerah seringkali belum optimal, termasuk dalam penggunaan Aplikasi SIAp Sulteng di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pusat pelayanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya memberikan inovasi digital pelayanan berupa pengelolaan data kepegawaian. SIAp Sulteng merupakan inovasi penting dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan data kepegawaian secara digital yang efisien dan transparan. Aplikasi ini merupakan bentuk kerja sama antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, aplikasi ini mengadopsi sistem digitalisasi yang mendukung implementasi sistem merit, sehingga pelayanan kepada aparatur negara menjadi lebih efektif dan inovatif. Melalui SIAp Sulteng, proses pengelolaan data

³ Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif* (ed. 2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

kepegawaian tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa “Digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh”. SIAP Sulteng sebagai salah satu inovasi digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat memudahkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengurusan administrasi kepegawaian yang menggunakan persyaratan data diri dari masing-masing pegawai, mulai dari pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, izin cuti, hingga pemberhentian atau pensiun pegawai lebih dimudahkan. SIAP Sulteng sebagai tempat penyimpanan data-data pegawai diharapkan dapat memudahkan semua urusan administrasi tersebut sehingga masing-masing Aparatur Sipil Negara yang mengurus urusan administrasi kepegawaiannya tidak lagi mengumpulkan persyaratan atau data Aparatur Sipil Negara dengan kertas, akan tetapi petugas Badan Kepegawaian Daerah bisa menarik data dari aplikasi SIAP Sulteng sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas (Paperless).⁴

Dalam Implementasi inovasi SIAP Sulteng mengalami

⁴ Aura Zharfa Nazhira, Candradewini Candradewini, (2025), *Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon*. JANE (Jurnal Administrasi Negara), Agustus 2025

beberapa kendala dilapangan sesuai dengan pengamatan penulis sebelum tesis ini dibuat (Pra Penelitian), permasalahan utama yang dihadapi dalam inovasi ini adalah ketidakefisienan dalam pengelolaan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara, seperti duplikasi data, keterlambatan pembaruan informasi, dan ketergantungan pada proses manual.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari pukul kepada ketua tim pengelolaan data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan insial (Rt) sebagai ketua tim Aplikasi SIAp Sulteng mengatakan bahwa 1) masih banyak pegawai yang belum mengupload data mereka di SIAp Sulteng terutama untuk guru yang ada di kabupaten-kabupaten kendala tersebut dikarenakan masih ada pegawai yang gagap teknologi, masalah teknis, kurangnya sosialisasi yang memadai Akibatnya, potensi aplikasi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan kepegawaian belum sepenuhnya tercapai.⁵

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi **“Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sulawesi Tengah (SIap Sulteng) Dalam Pengelolaan Data Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”** serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya.

⁵ Gaol, J. L. (2014). *A to Z Human Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis)*. Jakarta: Grasindo.Hutahaean (2015, hlm.13)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan SIAP Sulteng pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Sstem Informasi Aparatur Sulawesi Tengah (SIAP Sulteng) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Penentuan Metode Penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya yang diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan dari penelitian terhadap fenomena yang terjadi yang menjadi fokus penelitian seorang penulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai penerapan SIAP Sulteng pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁶ Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah selama tiga bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Agustus 2025.

⁶ Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

D. PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah. BKD merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Lembaga ini bertanggung jawab dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan karier, pembinaan disiplin, mutasi, promosi, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian. BKD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pusat layanan administrasi kepegawaian bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi, sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.



Gambar 4.1 Lokasi Penelitian (BKD Sulawesi Tengah)

Sumber : Dokumentasi Penulis

Secara administratif, BKD Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di ibu kota provinsi, yaitu Kota Palu. Kantor BKD dilengkapi dengan berbagai unit dan bidang yang menangani urusan kepegawaian, seperti bidang mutasi, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang data dan informasi kepegawaian, serta sekretariat. Dalam konteks penelitian ini, BKD menjadi lokasi yang relevan karena institusi ini mengelola dan mengimplementasikan penggunaan aplikasi SIAp Sulteng sebagai sistem informasi kepegawaian berbasis digital. Melalui aplikasi tersebut, BKD melakukan pendataan, pemutakhiran informasi, serta pelayanan administrasi kepegawaian kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, BKD Provinsi Sulawesi Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian mengenai optimalisasi penggunaan aplikasi SIAp Sulteng dalam pengelolaan data kepegawaian.

1. Penerapan SIAp Sulteng pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pembahasan pada bagian ini menguraikan hasil penelitian yang telah disajikan pada Bab IV dengan mengaitkannya pada teori-teori serta penelitian yerdahulu yang menjadi landasan konseptual penelitian.⁷

Penerapan Sistem Informasi Aparatur Sulawesi Tengah (SIAp Sulteng) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan telah berfungsi sebagai instrumen pendukung kinerja organisasi. Jika dikaitkan dengan teori keberhasilan sistem informasi DeLone

⁷ Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).

dan McLean, kualitas sistem tercermin dari kemampuan aplikasi dalam menyederhanakan proses administrasi kepegawaian, menggantikan mekanisme manual, serta menyediakan alur kerja yang lebih terstruktur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dimas Nuraji Putra Widiyanto dan Aura Zharfa Nazhira & Candradewini yang menyatakan bahwa sistem informasi kepegawaian mampu meningkatkan efektivitas layanan dan efisiensi kerja ASN.⁸ Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada optimalisasi kinerja atau penilaian kinerja ASN, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemanfaatan sistem sebagai sarana pelayanan dan pengelolaan data aparatur.

Dari sisi kualitas informasi, data yang tersedia dalam aplikasi SIAP Sulteng dinilai cukup lengkap dan disajikan secara sistematis, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi kepegawaian. Namun demikian, belum optimalnya pemutakhiran data menunjukkan bahwa kualitas informasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip akurasi dan ketepatan waktu sebagaimana ditekankan dalam teori sistem informasi. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Firda Afra Habiba Salsabila (yang mengungkapkan bahwa keterlambatan pembaruan data masih menjadi kelemahan utama dalam penerapan sistem informasi kepegawaian. Perbedaannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kendala pembaruan data, ASN tetap memanfaatkan aplikasi sebagai sumber informasi awal sebelum melakukan klarifikasi lebih lanjut.⁹

⁸ Dimas Nuraji Putra Widiyanto, (2023), *Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Dan Layanan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang

⁹ Firda Afra Habiba Salsabila. (2022). *Optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Guru Surabaya (Siagus) dalam Penilaian Kinerja Guru di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Kualitas pelayanan dalam penerapan SIAP Sulteng juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan sistem. Pelayanan yang responsif dan komunikatif dari petugas BKD mencerminkan adanya dukungan organisasi terhadap implementasi sistem informasi. Dalam perspektif DeLone dan McLean, kualitas pelayanan menjadi faktor yang memengaruhi kepuasan dan intensitas penggunaan sistem. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sry Handayan dkk. (2024) yang menegaskan bahwa dukungan teknis dan pelayanan operator menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem informasi kepegawaian. Perbedaannya terletak pada konteks pelayanan, di mana penelitian ini lebih menyoroti peran pelayanan dalam mendukung pemanfaatan data ASN, bukan semata-mata penilaian kinerja.

Intensitas penggunaan aplikasi SIAP Sulteng menunjukkan bahwa sistem tidak hanya digunakan secara situasional, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas kerja ASN. ASN memanfaatkan aplikasi untuk mengurus administrasi kepegawaian sekaligus melakukan pengecekan data secara berkala. Dalam kerangka teori sistem informasi, tingginya intensitas penggunaan menunjukkan bahwa sistem dianggap relevan dan bermanfaat oleh pengguna. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Eka Ubaya Taruna Rauf & Hinfia Mosshananza yang menyebutkan bahwa tingkat penggunaan sistem informasi meningkat ketika aplikasi memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi tidak selalu berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga

didorong oleh kebutuhan personal ASN untuk memastikan akurasi data kepegawaiannya.¹⁰

Berkaitan dengan kepuasan pengguna, secara umum ASN merasa terbantu dengan penerapan SIAp Sulteng karena kemudahan akses dan kecepatan proses yang ditawarkan. Kepuasan ini mencerminkan hubungan timbal balik antara kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam teori DeLone dan McLean. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna meningkat ketika sistem informasi mampu memenuhi kebutuhan kerja dan memberikan manfaat nyata. Perbedaannya, penelitian ini menemukan bahwa kepuasan pengguna masih bersifat kondisional, karena sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan pembaruan data yang tersedia dalam sistem.

Secara keseluruhan, penerapan SIAp Sulteng menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi kepegawaian tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas informasi, pelayanan, serta kesiapan pengguna. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memperkuat temuan bahwa sistem informasi kepegawaian berkontribusi positif terhadap efektivitas layanan ASN, namun memberikan sudut pandang berbeda dengan menempatkan aplikasi sebagai sarana pelayanan dan pengelolaan data aparatur di tingkat pemerintah provinsi, bukan hanya sebagai alat evaluasi kinerja.

¹⁰ Eka Ubaya Taruna Rauf, Hinfa Mosshananza. (2025). *Optimalisasi Implementasi Aplikasi E-Kinerja Dalam Pengembangan E-Government Di BKPSDM Kota Bandar Lampung*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Sistem Informasi Aparatur Sulawesi Tengah (SIAp Sulteng) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penerapan SIAp Sulteng terlihat dari manfaat langsung yang dirasakan oleh ASN, khususnya dalam mempercepat proses administrasi dan mengurangi ketergantungan pada birokrasi manual. Sistem yang terintegrasi memungkinkan ASN mengunggah dan mengakses data secara elektronik, sehingga proses pelayanan menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit. Keuntungan ini mendorong meningkatnya intensitas penggunaan aplikasi serta memperkuat persepsi positif ASN terhadap keberadaan SIAp Sulteng.

Selain manfaat sistem, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak BKD juga menjadi faktor pendukung penting. Responsivitas petugas dalam menangani kendala teknis dan kesalahan data membantu menjaga kelancaran penggunaan aplikasi. Pelayanan yang ramah dan komunikatif membuat ASN merasa terbantu, sehingga kendala teknis tidak menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem secara keseluruhan.¹¹

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, faktor penghambat penerapan SIAp Sulteng berkaitan dengan kualitas informasi dan kesiapan pengguna. Pemutakhiran data yang belum sepenuhnya optimal menyebabkan sebagian ASN meragukan keakuratan informasi yang tersedia

¹¹ Sry Handayani, Widyaningsih, Wilda Nur Muflaha. (2024). yang berjudul *Optimalisasi Penerapan Aplikasi E-Kinerja Pada Kantor Kecamatan Sendana Kota Palopo*. Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

dalam aplikasi. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknologi informasi pada sebagian ASN menghambat pemanfaatan fitur aplikasi secara maksimal, terutama bagi pengguna yang belum terbiasa dengan sistem digital.¹²

Faktor penghambat lainnya berasal dari aspek teknis, seperti gangguan jaringan internet yang mempengaruhi kecepatan akses aplikasi. Kondisi ini dapat menurunkan intensitas penggunaan dan berdampak pada kepuasan pengguna. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firda Afra Habiba Salsabila (2022) dan Nyoman Yudha Astriayu Widyari dkk. (2025) yang menyebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan pembaruan data masih menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem informasi kepegawaian di instansi pemerintah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Sistem Informasi Aparatur Sulawesi Tengah (SIAP Sulteng) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SIAP Sulteng pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah : SIAP Sulteng telah diterapkan sebagai upaya digitalisasi pengelolaan data dan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan terintegrasi. Sistem ini dimanfaatkan dalam administrasi dan pengelolaan data aparatur, namun penerapannya belum optimal karena pemanfaatan fitur belum maksimal, pemahaman pengguna yang belum merata, serta ketergantungan pada operator tertentu.

¹² Gaol, J. L. (2014). *A to Z Human Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis)*. Jakarta: Grasindo.Hutahaean (2015, hlm.13)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan SIAP Sulteng : Faktor pendukung meliputi dukungan pimpinan, regulasi yang tersedia, serta kebutuhan pelayanan kepegawaian yang cepat dan akurat. Faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM teknis, minimnya sosialisasi dan pelatihan, kendala jaringan dan sistem, serta resistensi sebagian aparatur terhadap perubahan digital.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan aplikasi SIAP Sulteng dalam pengelolaan data kepegawaian ASN di BKD Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa saran dapat diajukan sebagai bahan perbaikan ke depan.

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, BKD Provinsi Sulawesi Tengah disarankan untuk mengoptimalkan faktor pendukung berupa kesiapan sistem dan dukungan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas aplikasi SIAP Sulteng melalui perbaikan stabilitas jaringan, kecepatan akses, serta pengembangan fitur secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pengguna, sehingga aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai media administrasi dan penyimpanan data, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan kepegawaian yang efektif.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat terkait kualitas informasi dan konsistensi penggunaan, BKD Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperkuat mekanisme pemutakhiran data ASN secara rutin, terkoordinasi, dan berbasis prosedur yang jelas antara BKD dan OPD, agar data yang tersaji dalam aplikasi lebih akurat, lengkap,

dan mutakhir, sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses konfirmasi dan administrasi manual.

3. Dalam rangka mengurangi hambatan sumber daya manusia dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan aplikasi, BKD Provinsi Sulawesi Tengah disarankan untuk meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis secara berkala, disertai penguatan layanan bantuan dan komitmen pimpinan, sehingga penggunaan SIAp Sulteng dapat terinternalisasi sebagai budaya kerja dan mendukung peningkatan efektivitas pelayanan kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A. (2014). *Analisis optimalisasi pelayanan konsumen berdasarkan teori antrian pada KALTIMGPS.com di Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2(3), 346–357.
- Anjelita, P. & Rosiska, E. (2019). *Rancang Bangun Sistem Informasi E-Learning pada SMK Negeri 3 Batam*. Computer and Science Industrial Engineering (COMASIE), 1(01), 132–141.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta.
- Aura Zharfa Nazhira, Candradewini Candradewini, (2025), *Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya*

Manusia Kota Cirebon. JANE (Jurnal Administrasi Negara), Agustus 2025

Dimas Nuraji Putra Widiyanto, (2023), *Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Dan Layanan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif (ed. 2)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Eka Ubaya Taruna Rauf, Hinfia Mosshananza. (2025). *Optimalisasi Implementasi Aplikasi E-Kinerja Dalam Pengembangan E-Government Di BKPSDM Kota Bandar Lampung*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik

Firda Afra Habiba Salsabila. (2022). *Optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Guru Surabaya (Siagus) dalam Penilaian Kinerja Guru di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Gaol, J. L. (2014). *A to Z Human Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis)*. Jakarta: Grasindo. Hutahaean (2015, hlm.13)

Jogiyanto, H. M. (2017). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.

- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI-Press. Miles, Huberman dan Saldana (2014)
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mulyanto (2009, hlm.29)
- Nugrahani, Farida (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cetakan ke-3). Jakarta: Balai Pustaka
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*
- Schermerhorn, J. R., Jr. (1996). *Management* (5th ed., hlm. 4). New York: John Wiley & Sons.
- Seah, Jonny, & Muhammad Rasid Ridho. (2020). *Perancangan Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang untuk Alat Berat Berbasis Desktop pada CV Batam Jaya*. *Computer and Science Industrial Engineering (COMASIE)*, 3(2), 1–9. jurnal Andi misna, 2015

Sry Handayani, Widyaningsih, Wilda Nur Mufliha. (2024). yang berjudul *Optimalisasi Penerapan Aplikasi E-Kinerja Pada Kantor Kecamatan Sendana Kota Palopo*. Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-3. Bandung: Alfabeta

Wahyudi, & Ridho. (2020). *Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar siswa di MTsN 3 Kota Banjarmasin* (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin).

Yakub. (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).

